SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasioanl Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 131);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 148);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. laporan operasional;
   d. laporan perubahan ekuitas;
   e. laporan arus kas
   f. neraca; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp879.766.152.580,43
b.	Belanja Daerah	Rp936.932.957.645,40
	Surplus/(defisit)	(Rp57.166.805.064,97)
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp103.840.436.610,42
	2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp37.068.877.328,00
	Pembiayaan netto	Rp66.771.559.282,42
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp9.604.754.217,45

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp40.417.983.959,43 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp920.184.136.540,00
2. Realisasi	Rp879.766.152.580,43
selisih kurang	(Rp40.417.983.959,43)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp54.303.700.725,02 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp991.236.658.370,42
2. Realisasi	Rp936.932.957.645,40
selisih kurang	(Rp54.303.700.725,02)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp13.885.716.765,45 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/ defisit setelah perubahan	(Rp71.052.521.830,42)
2. Realisasi	(Rp57.166.805.064,97)
selisih lebih	Rp13.885.716.765,45

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5.827.899.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan setelah perubahan	Rp109.668.335.830,42
2. Realisasi	Rp103.840.436.610,42
selisih kurang	(Rp5.827.899.220,00)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.546.122.672,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran setelah perubahan	Rp38.615.000.000,00
2. Realisasi	Rp37.068.877.328,00
selisih kurang	(Rp1.546.122.672,00)

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp4.281.776.548,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan setelah perubahan	Rp71.053.335.830,42
2. Realisasi	Rp66.771.559.282,42
selisih kurang	(Rp4.281.776.548,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp50.849.035.830,42
b.	Silpa	Rp9.604.694.217,45
c.	Lain-lain	Rp0,00
d.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp9.604.754.217,45

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Pendapatan LO	Rp817.093.920.589,89
b.	Beban	Rp888.108.698.691,37
c.	Surplus/defisit dari operasi	(Rp71.014.778.101,48)
d.	Surplus/defisit kegiatan non operasional	Rp0,00
e.	Surplus/defisit LO	(Rp71.982.270.516,48)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a.	Ekuitas awal	Rp1.802.869.484.723,14
b.	Surplus/defisit LO	(Rp71.982.270.516,48)
c.	Koreksi ekuitas lainnya	(Rp6.214.329.252,29)
d.	Ekuitas akhir	Rp1.724.672.884.954,37

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 januari 2021	Rp50.963.257.635,52
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp186.284.206.471,43
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	(Rp243.451.011.536,40)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp15.922.463.452,00
e.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non-anggaran	Rp469.943.982,90
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp10.188.920.005,45

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp1.920.720.792.278,55
b.	Jumlah kewajiban	Rp196.047.907.324,18
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp1.724.672.884.954,37

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

a.	Lampiran I	: Laporan Realisasi Anggaran;
	Lampiran I.1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan pemerintahan dearah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III : Laporan operasional;
d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 155

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR 03/1304/TBB/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN I:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**920.184.136.540,00**	**879.766.152.580,43**	**(40.417.983.959,57)**	**95,61**
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.523.530.590,00	46.579.011.595,43	(8.944.518.994,57)	83,89
4 . 1 . 1	Pajak Daerah Retribusi Daerah	19.098.500.000,00	19.874.450.791,65	775.646.791,65)	104,06
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.678.630.000,00	1.650.159.759,00	(28.470.241,00)	98,30
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.601.414.704,00	2.630.507.797,43	29.093.093,43	101,12
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	32.144.985.886,00	22.423.893.247,35	(9.720.788.638,65)	69,76
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	823.350.605.950,00	796.929.767.985,00	(26.420.837.965,00)	96,79
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	741.064.171.177,00	740.085.017.984,00	(979.153.193,00)	99,87
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.286.434.773,00	56.844.750.001,00	(25.441.684.772,00))	69,08

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.310.000.000,00	36.257.373.000,00	(5.052.627.000,00)	87,77
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	41.310.000.000,00	36.257.373.000,00	(5.052.627.000,00)	87,77
5	**BELANJA DAERAH**	**991.236.658.370,42**	**936.932.957.645,40**	**(54.303.700.725,02)**	**94,52**
5 . 1	BELANJA OPERASI	594.084.375.534,42	549.807.397.920,00	(44.276.977.614,42)	92,55
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	332.227.319.581,42	309.144.195.766,00	(23.083.123.815,42)	93,05
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.597.746.893,00	208.415.433.764,00	(18.182.313.129,00)	91,98
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	8.388.000.000,00	8.075.098.450,00	(312.901.550,00)	96,27
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	18.035.209.060,00	15.510.369.940,00	(2.524.839.120,00)	86,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	8.836.100.000,00	8.662.300.000,00	(173.800.000,00)	98,03
5 . 2	BELANJA MODAL	250.489.608.562,00	243.451.011.536,40	(7.038.597.025,60)	97,19
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	9.962.444.000,00	9.868.382.380,00	(94.061.620,00)	99,06
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.532.623.605,00	22.339.638.986,90	(2.192.984.618,10)	91,06
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.189.023.753,00	54.926.780.517,80	(1.262.243.235,20)	97,75
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	155.722.718.527,00	153.908.661.351,70	(1.814.057.175,30)	98,84
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.082.798.677,00	2.407.548.300,00	(1.675.250.377,00)	58,97
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	967.492.415,00	(1.532.507.585,00)	38,70
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	967.492.415,00	(1.532.507.585,00)	38,70
5 . 4	BELANJA TRANSFER	144.162.674.274,00	142.707.055.774,00	(1.455.618.500,00)	98,99

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	5.288.643.000,00	4.792.178.045,00	(496.464.955,00)	90,61
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	138.874.031.274,00	137.914.877.729,00	(959.153.545,00)	99,31
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(71.052.521.830,42)**	**(57.166.805.064,97)**	**13.885.716.765,45**	**80,46**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109.668.335.830,42	103.840.436.610,42	(5.827.085.220,00)	94,69
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.849.035.830,42	50.849.035.830,42	60.000,00	100,00
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	54.383.600.000,00	52.991.340.780,00	(1.392.259.220,00)	97,44
6 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.435.700.000,00	0,00	(4.434.886.000,00)	0,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.615.000.000,00	37.068.877.328,00	(1.546.122.672,00)	96,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
6 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37.615.000.000,00	37.068.877.328,00	(546.122.672,00)	98,55
	PEMBIAYAAN NETTO	**71.053.335.830,42**	**66.771.559.282,42**	**(4.280.962.548,00)**	**93,97**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**9.604.754.217,45**	**9.604.754.217,45**	**0,00**

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	50.849.035.830,42	54.835.632.263,62
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	50.849.095.830,42	55.003.523.200,92
	Sub Total	**(60.000,00)**	**(167.890.937,30)**
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	9.604.754.217,45	50.849.035.830,42
	Sub Total	**9.604.694.217,45**	**50.681.144.893,12**
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	60.000,00	-
5	Lain-lain	0,00	167.890.937,30
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	**9.604.754.217,45**	**50.849.035.830,42**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REF	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	2	3	4	5	6	7
A	**PENDAPATAN - LO**	**8**	**817.093.920.589,89**	**776.481.163.425,91**	**40.612.757.163,98**	**5,23**
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	**8.1**	**55.548.036.450,88**	**43.624.175.523,91**	**11.923.860.926,97**	**27,33**
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	8.1.1	20.154.210.179,97	19.339.451.829,73	814.758.350,24	4,21
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	8.1.2	1.597.759.759,00	4.717.785.948,67	(3.120.026.189,67)	(66,13)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	8.1.3	2.247.440.164,56	4.484.181.783,36	(2.236.741.618,80)	(49,88)
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	8.1.4	31.548.626.347,35	15.082.755.962,15	16.465.870.385,20	109,17
II	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**	**8.2**	**15.674.740.886,01**	**688.833.775.887,00**	**26.840.964.999,01**	**3,90**
1	Pendapatan Transfer Pemerintah-LO	8.2.1	648.635.854.984,00	631.141.021.983,00	17.494.833.001,00	2,77
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	8.2.2	67.038.885.902,01	57.692.753.904,00	9.346.131.998,01	16,20
III	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	**8.3**	**45.871.143.253,00**	**44.023.212.015,00**	**1.847.931.238,00**	**4,20**
1	Pendapatan Hibah - LO	8.3.1	9.613.770.253,00	3.220.582.890,00	6.393.187.363,00	198,51
2	Dana Darurat - LO	8.3.2	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	8.3.4	36.257.373.000,00	40.802.629.125,00	(4.545.256.125,00)	(11,14)
B	**BEBAN**	**9**	**888.108.698.691,37**	**834.155.769.469,52**	**53.952.929.221,85**	**6,47**
1	Beban Pegawai - LO	9.1.1	317.209.715.946,00	331.072.690.452,00	(13.862.974.506,00)	(4,19)
2	Beban Barang dan Jasa	9.1.2	201.509.667.610,97	201.758.302.810,52	(248.635.199,55)	(0,12)
3	Beban Bunga	9.1.3	8.935.494.607,65	9.931.228.819,31	(995.734.211,66)	(10,03)
4	Beban Subsidi	9.1.4	-	-	-	
5	Beban Hibah	9.1.5	16.406.942.588,00	11.781.640.676,00	4.625.301.912,00	39,26
6	Beban Bantuan Sosial	9.1.6	8.662.300.000,00	6.814.800.000,00	1.847.500.000,00	27,11
7	Beban Penyisihan Piutang	9.1.8	118.069.559,79	1.173.659.210,37	(1.055.589.650,58)	(89,94)
8	Beban Lain-lain	9.1.9	-	-	-	

No	URAIAN	REF	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	2	3	4	5	6	7
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.1.10	28.194.515.530,12	29.665.234.978,00	(1.470.719.447,88)	(4,96)
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.2.1	24.290.526.557,00	19.415.635.080,00	4.874.891.477,00	25,11
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.2.2	233.453.212.299,84	175.504.737.588,00	57.948.474.711,84	33,02
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9.2.3	-	-	-	-
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	9.2.4	-	-	-	-
14	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.2.5	44.984.314,32	-	44.984.314,32	-
15	Beban Bagi Hasil		2.817.554.948,68	1.974.623.096,32	842.931.852,36	42,69
16	Beban Bantuan Keuangan	9.2.6	46.465.714.729,00	45.063.216.759,00	1.402.497.970,00	3,11
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		**(71.014.778.101,48)**	**(57.674.606.043,61)**	**(13.340.172.057,87)**	**23,13**
IV	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
1	Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	8.4.3	-	121.370.289,83	(121.370.289,83)	(100,00)
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	9.3.1	-	-	-	-
3	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	9.3.2	-	424.463.412,24	(424.463.412,24)	(100,00)
4	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	9.3.3	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**-**	**(303.093.122,41)**	**303.093.122,41**	**(100,00)**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(71.014.778.101,48)**	**(57.977.699.166,02)**	**(13.037.078.935,46)**	**22,49**
V	**POS LUAR BIASA**					**-**
1	Beban Tak Terduga	9.4.1	967.492.415,00	16.798.820.118,00	(15.831.327.703,00)	(94,24)
	SURPLUS/DEFISIT-LO		**(71.982.270.516,48)**	**(74.776.519.284,02)**	**2.794.248.767,54**	**(3,74)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
I	**EKUITAS AWAL**	**1.802.869.484.723,14**	**2.296.401.406.620,24**
II	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**-71.982.270.516,48**	**-74.776.519.284,02**
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
3	Koreksi ekuitas lainnya	-6.214.329.252,29	-418.755.402.613,08
4	Transfer ekuitas antar SKPD	0,00	0,00
III	**EKUITAS AKHIR**	**1.724.672.884.954,37**	**1.802.869.484.723,14**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN V:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REF	2021	2020
1	2	3	4	5
A	**ASET**	**1**		
I	**ASET LANCAR**	**1.1**		
a	**Kas**	**1.1.1**		
1	Kas di Kas Daerah	1.1.1.01	7.010.912.320,04	48.798.126.124,42
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.02	-	8.890.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.03	-	261.849.353,00
4	Kas di BLUD	1.1.1.04	3.143.551.073,41	-
5	Kas BOS	1.1.1.05	34.456.612,00	133.681.010,00
6	Kas di Bendahara FKTP	1.1.1.06	-	1.760.711.148,10
7	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	1.1.1.07	-	-
8	Investasi Jangka Pendek	1.1.2	-	-
9	Piutang Pajak Hotel	1.1.3.06	3.241.025,00	400.000,00
10	Piutang Pajak Restoran	1.1.3.07	66.182.672,00	6.348.500,00
11	Piutang Pajak Hiburan	1.1.3.08	1.946.914,00	2.800.052,00
12	Piutang Pajak Reklame	1.1.3.09	26.454.200,00	35.478.000,00
13	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.1.3.10	905.649.775,00	798.930.153,00
14	Piutang Pajak Parkir	1.1.3.11	6.761.000,00	6.400.000,00
15	Piutang Pajak Air Tanah	1.1.3.12	14.984.077,28	14.792.865,42
16	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	1.1.3.15	551.980.791,00	402.122.657,00
17	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.1.4.01.01	-	-
18	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.1.4.02.05	-	-
19	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.1.4.02.14	-	-
20	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	1.1.6	9.334.438.828,89	41.003.000,00
21	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.1.8.01.01	7.332.796.979,00	6.347.341.862,01
22	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.1.8.01.02	4.915.639.651,00	2.910.846.500,00
23	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.1.8.01.03	14.449.526.898,00	11.118.133.612,00

No	URAIAN	REF	2021	2020
1	2	3	4	5
24	Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.1.8.01.04	46.985.133,00	35.528.471,98
25	Piutang Dana Bagi Hasil Rokok	1.1.8.01.05	3.861.037.686,00	-
26	Piutang Lainnya	1.1.9	4.434.886.000,00	4.546.200.728,89
27	Bagian Lancar Piutang Lainnya	1.1.9.01	-	-
28	Penyisihan Piutang	1.1.10	(4.653.142.355,98)	(4.545.359.210,37)
29	Beban Dibayar Dimuka	1.1.11	73.643.235,26	55.789.127,61
30	Persediaan	1.1.12	8.177.483.074,00	7.981.601.341,00
	JUMLAH ASET LANCAR		**59.739.415.588,90**	**80.721.615.296,06**
II	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**1.2**		
a	**Investasi Nonpermanen**	**1.2.1**		
1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	1.2.1.01		
2	Investasi dalam Obligasi	1.2.1.02		
3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	1.2.1.03		
4	Dana Bergulir	1.2.1.04		
5	Deposito Jangka Panjang	2.2.1.03		
6	Investasi Non Permanen Lainnya	2.2.1.04		
	Jumlah Investasi Nonpermanen		**-**	**-**
b	**Investasi Permanen**	**1.2.2**		
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.2.2.01	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2	Investasi Permanen Lainnya	1.2.2.02	10.601.715.338,75	10.984.782.971,62
	Jumlah Investasi Permanen		**16.601.715.338,75**	**16.984.782.971,62**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**16.601.715.338,75**	**16.984.782.971,62**
III	**ASET TETAP**	**1.3**		
1	Tanah	1.3.1	423.552.843.062,00	408.217.741.972,00
2	Peralatan dan Mesin	1.3.2	311.733.702.484,45	283.527.700.612,55
3	Gedung dan Bangunan	1.3.3	856.320.665.499,46	726.673.091.835,87
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.3.4	1.857.950.663.086,83	1.711.222.879.198,76
5	Aset Tetap Lainnya	1.3.5	28.349.893.159,77	26.148.365.154,33
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.6	14.937.129.724,00	104.011.311.609,21
7	Akumulasi Penyusutan	1.3.7	(1.662.892.989.426,86)	(1.365.479.722.653,10)
	JUMLAH ASET TETAP		**1.829.951.907.589,65**	**1.894.321.367.729,62**
IV	**DANA CADANGAN**	**1.4**		
1	Dana Cadangan	1.4.1		
	JUMLAH DANA CADANGAN			
V	**ASET LAINNYA**	**1.5**		
1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	1.5.1.01		
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.5.1.02		
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	1.5.2		
4	Aset Tidak Berwujud	1.5.3	1.271.615.105,00	465.429.905,00
5	Amortisati Aset Tak berwujud	1.5.5.01	(329.866.080,75)	(284.881.766,43)
6	Aset Tidak Berwujud Netto		941.749.024,25	180.548.138,57

No	URAIAN	REF	2021	2020
1	2	3	4	5
7	Aset Yang Akan Dihibahkan			
8	Aset Lain-lain	1.5.4.01	24.076.494.652,00	23.287.249.152,00
9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	1.5.6.01	(10.590.489.915,00)	(10.590.489.915,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA		**14.427.753.761,25**	**12.877.307.375,57**
	JUMLAH ASET		**1.920.720.792.278,55**	**2.004.905.073.372,87**
B	**KEWAJIBAN**	**2**		
I	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**2.1**		
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.1.1	584.165.788,00	114.221.805,10
2	Utang Bunga	2.1.2	8.896.715.016,93	8.136.928.519,28
3	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	2.1.3	39.246.539.200,43	36.968.267.668,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	2.1.5	119.968.000,00	7.500.000,00
5	Utang Belanja	2.1.6	35.029.843.823,55	17.239.766.755,05
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.1.7	10.001.000,70	41.153.030.987,30
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**83.887.232.829,61**	**103.619.715.734,73**
II	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**2.2**		
1	Utang Dalam Negeri	2.2.1	112.160.674.494,57	98.415.872.915,00
2	Utang Luar Negeri	2.2.1.02		
3	Premium (Diskonto) Obligasi	2.2.1.03		
4	Utang Jangka Panjang Lainnya	2.2.2		
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**112.160.674.494,57**	**98.415.872.915,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN		**196.047.907.324,18**	**202.035.588.649,73**
C	**EKUITAS**	**3**		
	JUMLAH EKUITAS		**1.724.672.884.954,37**	**1.802.869.484.723,14**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.920.720.792.278,55**	**2.004.905.073.372,87**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN VI:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REF	2021	2020
1	2	3	4	5
I	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**5.5.1**		
A	**ARUS KAS MASUK**	**5.5.1.1**		
1	Penerimaan Pajak Daerah		19.874.450.791,65	18.903.586.918,31
2	Penerimaan Retribusi Daerah		1.650.159.759,00	4.760.043.398,67
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.630.507.797,43	2.499.398.811,74
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		22.423.893.247,35	14.930.438.233,26
5	Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		28.074.423.464,00	17.674.832.243,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum		436.265.639.071,00	441.732.032.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		158.687.021.449,00	164.079.498.740,00
8	Penerimaan Pendapatan Hibah		-	-
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		56.844.750.001,00	61.513.503.973,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		25.608.771.000,00	7.654.659.000,00
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		-	-
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
13	Penerimaan Pendapatan Lainnya		-	440.999.125,00
14	Penerimaan Dana Desa		91.449.163.000,00	90.895.123.000,00
15	Penerimaan Dana BOS		36.257.373.000,00	40.361.630.000,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		**879.766.152.580,43**	**865.445.745.442,98**
B	**ARUS KAS KELUAR**	**5.5.1.2**		
1	Pembayaran Pegawai		309.144.195.766,00	331.079.760.338,00
2	Belanja Bunga		8.075.098.450,00	3.179.928.163,00
3	Pembayaran Hibah		15.510.369.940,00	11.275.122.336,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial		8.662.300.000,00	6.814.800.000,00
5	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
6	Pembayaran Tak Terduga		967.492.415,00	16.798.820.118,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-

No	URAIAN	REF	2021	2020
1	2	3	4	5
8	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa		-	-
9	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa, dan Partai Politik		137.914.877.729,00	135.482.671.559,00
10	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		4.792.178.045,00	857.977.440,00
11	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		208.415.433.764,00	178.840.648.978,00
12	Pembayaran Pokok Hutang		-	-
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		**693.481.946.109,00**	**684.329.728.932,00**
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**5.5.1.3**	**186.284.206.471,43**	**181.116.016.510,98**
II	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NONKEUANGAN**	**5.5.2**		
A	**ARUS KAS MASUK**	**5.5.2.1**		
1	Pencairan Dana Cadangan			
2	Penjualan Atas Tanah			
3	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin			
4	Penjualan Atas Bangunan dan Gedung			
5	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			
6	Penjualan Atas Tetap			
7	Penjualan Aset Lainnya			
8	Hasil Penjualan Atas Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen			
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		**-**	**-**
B	**ARUS KAS KELUAR**	**5.5.2.2**		
1	Pembentukan Dana Cadangan			
2	Perolehan Tanah		9.868.382.380,00	6.246.369.482,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin		22.339.638.986,90	56.450.300.185,30
4	Perolehan Bangunan dan Gedung		54.926.780.517,80	116.090.152.391,49
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		153.908.661.351,70	74.451.789.836,69
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.407.548.300,00	1.996.016.600,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
8	Pengeluran Pembelian Investasi Non Permanen			
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		**243.451.011.536,40**	**255.234.628.495,48**
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NONKEUANGAN	**5.5.2.3**	**-243.451.011.536,40**	**-255.234.628.495,48**
III	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN**			
A	**ARUS KAS MASUK**		**52.991.340.780,00**	**82.919.203.786,00**
1	Penerimaan Kembali - Pinjaman Daerah		52.991.340.780,00	82.919.203.786,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-	-
B	**ARUS KAS KELUAR**		**37.068.877.328,00**	**12.955.079.172,00**
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	1.500.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Utang		37.068.877.328,00	11.455.079.172,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		**15.922.463.452,00**	**69.964.124.614,00**
IV	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN**	**5.5.3**		
A	**ARUS KAS MASUK**	**5.5.3.1**		
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		81.832.463.345,22	62.711.537.820,93

No	URAIAN	REF	2021	2020
1	2	3	4	5
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		**81.832.463.345,22**	**62.711.537.820,93**
B	**ARUS KAS KELUAR**	**5.5.3.2**		
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		81.362.519.362,32	62.543.646.883,63
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		**81.362.519.362,32**	**62.543.646.883,63**
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	**5.5.3.3**	**469.943.982,90**	**167.890.937,30**
	KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA PERIODE	**5.5.4**	**(40.774.397.630,07)**	**(3.986.596.433,20)**
	SALDO AWAL KAS		**50.963.257.635,52**	**55.003.523.200,92**
	KOREKSI SILPA		**60.000,00**	**-167.890.937,30**
	SALDO AKHIR KAS		**10.188.920.005,45**	**50.849.035.830,42**
	KAS DI KAS DAERAH		**7.010.912.320,04**	**48.798.126.124,42**
	KAS DI BENDAHARA BLUD		**3.143.551.073,41**	**1.750.886.841,00**
	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		**0,00**	**261.849.353,00**
	KAS DI BENDAHARA BOS		**34.456.612,00**	**29.283.512,00**
	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		**0,00**	**8.890.000,00**
	KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)		-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUCIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222011011009